

ABSTRAK

Tindak pidana *revenge pornography* yang disertai unsur pemerasan merupakan bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi kompleks serta menimbulkan dampak merugikan bagi korban secara fisik, mental, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah regulasi hukum yang berlaku di Indonesia terkait kejahatan tersebut serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korbannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian menemukan bahwa aturan hukum yang mengatur mengenai *revenge pornography* dan pemerasan masih tersebar dalam berbagai perundang-undangan, seperti UU ITE dan KUHP, dan belum mengatur secara spesifik kedua tindakan tersebut sebagai satu kesatuan delik. Perlindungan terhadap korban pun masih menemui berbagai tantangan, mulai dari kesulitan dalam pembuktian, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, hingga belum maksimalnya layanan rehabilitasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan reformulasi regulasi yang lebih menyeluruh dan pendekatan hukum yang berorientasi pada korban demi mewujudkan perlindungan dan keadilan yang optimal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, *Revenge Pornography*, Kejahatan Siber, Pemerasan

ABSTRACT

The crime of revenge pornography accompanied by extortion is a form of cybercrime that is complex in nature and causes significant harm to victims physically, mentally, and socially. This study aims to examine the existing legal regulations in Indonesia concerning such offenses and to evaluate the forms of legal protection available to the victims. Using a normative juridical approach, the study found that legal provisions related to revenge pornography and extortion are still scattered across various laws, such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Indonesian Penal Code (KUHP), and have yet to specifically regulate these acts as a single, unified offense. Legal protection for victims also faces several challenges, including difficulties in evidence collection, limited understanding among law enforcement, and suboptimal recovery services. Therefore, there is a pressing need for more comprehensive regulatory reform and a victim-centered legal approach to ensure effective justice and protection.

Keywords: *Legal Protection, Victim, Revenge Pornography, Cybercrime, Extortion*